

IMPLEMENTASI FEMICIDE LAW DI HONDURAS

Mardaniah Adji Hasanah Putri¹, Yayuk Anggraini²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Abstrak

Pada tahun 2013, Honduras memasukkan *femicide* sebagai kejahatan khusus dalam amandemen konstitusinya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Honduras). Pemerintah Honduras juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional terkait perlindungan perempuan dan hak-haknya, yang bertentangan dengan kebijakan larangan aborsi di Honduras. Hal ini menimbulkan konflik atas hukum dan kebijakan yang berlaku, di mana kebijakan pelarangan aborsi merupakan salah satu bentuk *femicide*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah data primer berupa dokumen resmi dan data sekunder dari buku, jurnal, dan artikel dari situs web resmi. Penelitian ini menggunakan konsep kekerasan berbasis gender dan hukum *femicide* dalam menganalisis implementasi hukum femisida di Honduras. Hasil penelitian ini adalah Honduras perlu meningkatkan sistem pencegahannya, meningkatkan tanggung jawab pemerintah, meningkatkan strategi pemantauan dan hukuman karena tingginya tingkat impunitas dan banyaknya kebijakan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai hukum *femicide* itu sendiri.

Kata Kunci: Femisida, Kekerasan Berbasis Gender, Honduras

Abstract

In 2013, Honduras included *femicide* as a specific crime in an amendment to its constitution (Honduras Penal Code). The Honduras government has also ratified several international conventions related to the protection of women and their rights, which is in conflict with the abortion ban policy in Honduras. This gives rise to conflict over applicable laws and policies, where the policy of prohibiting abortion is a form of *femicide*. The research method used in this research is descriptive research and the type of data used is primary data in the form of official documents and secondary data from books, journals and articles from official websites. This research uses the concepts of gender-based violence and *femicide* law in analyzing the implementation of *femicide* law in Honduras. The results of this research are that Honduras needs to improve its prevention system, increase government responsibility, improve monitoring and punishment strategies because of the high level of impunity and many policies that are considered to be contradictory to the legal values of *femicide* itself.

Keywords: *Femicide, Gender-based Violence, Honduras*

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2013, Honduras telah memasukkan *femicide* sebagai spesifikasi kejahatan khusus dalam amandemen undang-undang (*Honduras Penal Code*) dan menjatuhkan hukuman pada pelaku kejahatan ini serta mengadopsi *The Law Against Trafficking of Persons and a National Plan Against Violence Towards Women* (OHCHR, 2016). Menurut *Honduras Penal Code*, kejahatan *femicide* didefinisikan sebagai seorang pria yang membunuh seorang wanita karena alasan gender dengan kebencian dan penghinaan atas kondisinya sebagai seorang wanita.

Femicide, juga dikenal sebagai feminisida, adalah bentuk paling ekstrem dari kekerasan berbasis gender atau *Gender-Based Violence* (GBV) dan didefinisikan sebagai "pembunuhan yang disengaja terhadap perempuan karena mereka perempuan."

Kriminalisasi aborsi berpotensi menaikkan angka pembunuhan perempuan hamil dan secara pasti dapat meningkatkan jumlah kekerasan terhadap perempuan. Faktanya, status hukum aborsi tidak mengurangi aborsi itu sendiri, melainkan berdampak pada keselamatan perempuan yang melakukannya. Banyak perempuan yang melakukan aborsi dengan menggunakan metode yang tidak aman dan seringkali berbahaya, yang memiliki konsekuensi yang merusak kesehatan dan mengancam nyawa perempuan.

Di negara-negara yang mengkriminalisasikan aborsi seperti Honduras, aborsi ilegal adalah penyebab utama kematian terkait kehamilan, dan sekitar setengah dari semua perempuan memerlukan pengobatan untuk komplikasi terkait aborsi, namun tidak semua mampu mengakses fasilitas kesehatan tersebut dikarenakan faktor ekonomi. Hal ini mengartikan bahwa kriminalisasi aborsi yang dilakukan di Honduras berdampak terhadap implikasi kesehatan perempuan di negara tersebut yang dapat dikaitkan sebagai salah satu bentuk *femicide*. *Femicide* sendiri di Honduras didefinisikan sebagai sebuah konsep yang mengacu pada pembunuhan yang dilakukan terhadap perempuan di Honduras sejak tahun 1990.

Pembatasan hukum pada aborsi tidak mengakibatkan aborsi menjadi lebih sedikit atau berkurang, melainkan memaksa perempuan untuk mempertaruhkan hidup dan kesehatan mereka dengan mencari perawatan aborsi yang tidak aman. Status hukum aborsi menunjukkan lebih dari sekedar kondisi atau keadaan di mana perempuan dan anak perempuan diizinkan secara hukum untuk memutuskan apakah akan hamil atau tidak. Ini juga mengungkapkan seberapa besar kemungkinan seorang wanita meninggal karena aborsi yang tidak aman, apakah anak perempuan akan menyelesaikan pendidikan mereka, dan batasan kemampuan perempuan dan anak perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik untuk mencapai kesejahteraan sosial. Singkatnya, melacak status hukum aborsi menunjukkan kepada kita di mana perempuan dan anak perempuan

diperlakukan dengan setara dan diberi kesempatan untuk mengarahkan jalan hidup mereka sendiri.

Apa yang dilakukan pemerintah Honduras dalam membuat dan menetapkan *Femicide Law*, dimana pemerintah Honduras juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional terkait perlindungan perempuan dan hak-haknya, telah bertentangan dengan kebijakan *abortion-banned* yang berlaku di Honduras. Hal ini menimbulkan pertentangan hukum dan kebijakan yang berlaku, dimana kebijakan *abortion-banned* tersebut merupakan salah satu bentuk *femicide*. Hak perempuan untuk hidup, sehat, menentukan nasib sendiri, kesetaraan, dan kebebasan dari perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat mengharuskan negara menjamin akses mereka ke layanan reproduksi yang berkualitas, termasuk aborsi. Faktanya, kriminalisasi dan pembatasan akses aborsi tidak menurunkan angka aborsi sendiri, justru berpotensi membahayakan kehidupan perempuan yang melakukan aborsi secara ilegal, berisiko dan mengancam nyawa.

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan analisis, gambaran, dan penjelasan mengenai implementasi *femicide law* terhadap kebijakan *abortion-banned* di Honduras dengan secara objektif dan sesuai dengan hasil analisis dan studi pustaka kemudian dikorelasikan dengan logika dan teori-teori pendukung secara sistematis dan faktual. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa *The Honduras Penal Code* dan segala bentuk informasi yang dapat diakses dan tersedia mengenai *abortion-banned* dan *femicide law* di Honduras. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip, buku-buku, dokumentasi, jurnal, literatur, media massa, *website*, dan lain-lain. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yaitu penelitian yang dalam penjelasan data berdasarkan fakta-fakta yang bersifat akurat, memiliki validitas tinggi dan relevan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan analisis menggunakan teori dan konsep yang kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

3. GENDER-BASED VIOLENCE DI HONDURAS

Kekerasan terhadap perempuan tersebar luas dan sistematis di Honduras, dan hal ini berdampak pada perempuan dalam berbagai cara dengan ditunjukkan oleh tingginya tingkat kekerasan senjata, kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan perempuan, dan kekerasan seksual. Korban GBV secara individual sebagian besar dinormalisasi dan diabaikan, meskipun ada pengakuan kolektif atas meluasnya kekerasan berbasis gender di negara-negara tersebut segala bentuknya.

Perlu dicatat bahwa di Amerika Latin, dua istilah berbeda telah distandarisasi untuk menggambarkan dua kejahatan serupa. *Femicide* (femicidio dalam bahasa Spanyol dan Portugis) adalah pembunuhan terhadap perempuan oleh laki-laki karena mereka perempuan, dan karena 'subordinasi' gender mereka. Subordinasi ini terletak pada relasi kekuasaan yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Belém do Pará. Kekerasan ini tidak terjadi secara acak; ini adalah produk dari struktur sosial tertentu di mana perempuan menempati posisi yang lebih rendah dan subordinat, sehingga memfasilitasi kekerasan terhadap mereka. *Feminicide* (feminicidio dalam bahasa Spanyol dan Portugis) berkaitan dengan impunitas dan keterlibatan terkait dengan femisida. Kejahatan tidak hanya terjadi ketika seorang perempuan dibunuh tetapi juga ketika negara tidak menyelidikinya secara menyeluruh dan menjadi kaki tangannya, serta secara tidak langsung berkontribusi dan berpartisipasi dalam pembunuhan tersebut. Dalam hal ini, Negara melakukan tindak pidana karena tidak menjamin hak perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan dan tidak menjamin haknya atas keadilan.

Sedangkan *femicide* di Honduras secara khusus adalah sebuah konsep yang mengacu pada pembunuhan yang dilakukan terhadap perempuan di Honduras sejak tahun 1990. Menurut undang-undang pidana di Honduras yaitu Honduras *Penal Code*, kejahatan *femicide* didefinisikan sebagai pembunuhan terhadap seorang perempuan karena alasan gender dengan kebencian dan penghinaan terhadap kondisinya sebagai seorang wanita.

Femicide law dapat diartikan secara sempit sebagai suatu aturan yang mengikat terkait pembunuhan perempuan, dan segala sesuatu yang mengakibatkan kematian perempuan. *Femicide law* termanifestasi dalam *African Women's Protocol*, *African Charter*, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan

International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Instrumen-instrumen internasional ini mendasari *femicide law* dalam konstelasi hak, termasuk hak untuk hidup, kebebasan pribadi, kesetaraan dan non-diskriminasi dan kebebasan dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Pada bulan Februari 2013, Kongres Nasional Honduras menyetujui reformasi hukum perdata nasional yang mengklasifikasikan femisida sebagai kejahatan serius, yang memungkinkan hukuman hingga 40 tahun. Pada tahun 2017, saat pembahasan KUH Perdata yang baru, terdapat usulan untuk mempertahankan tindak pidana *femicide* namun mengurangi hukumannya menjadi 20 hingga 30 tahun penjara. Menurut Honduras *Penal Code* yang berlaku hingga tahun 2018, tindak pidana *femicide* diartikan sebagai pembunuhan seorang laki-laki atau laki-laki terhadap seorang perempuan karena alasan gender, dengan rasa kebencian dan penghinaan terhadap kondisinya sebagai perempuan.

Antara tahun 2002 dan 2013, 3.923 perempuan dibunuh di Honduras. Jumlah pembunuhan terhadap perempuan mencapai 9,6% dari total jumlah pembunuhan di negara ini. Pada tahun 2013, 53 perempuan dibunuh setiap bulannya, dan lebih dari 90% kasus tersebut (seperti pembunuhan pada umumnya di Honduras) tidak dihukum. Data terkini melaporkan bahwa tingkat impunitas terhadap femisida masih tinggi, mencapai 95% dari 338 kasus yang terjadi sepanjang tahun 2017 hingga awal tahun 2018.

Aborsi adalah aspek yang sangat kontroversial dalam hak-hak reproduksi. Meskipun setiap negara di Amerika Latin mempunyai undang-undang dan peraturan yang berbeda mengenai aborsi, sentimen umum yang ada adalah ketidaksetujuan. Aborsi di Amerika Latin mempunyai sejarah yang tidak aman dan ilegal (terutama bagi perempuan miskin), dan baru-baru ini terjadi perbaikan di kedua bidang tersebut. Sebagian besar perbaikan ini disebabkan oleh kontrasepsi modern, perawatan darurat, dan pendidikan. Demikian pula, advokasi dan konflik nasional seputar hak aborsi telah berkembang di Amerika Latin.

Di Honduras, aborsi merupakan tindak pidana dalam segala hal, termasuk pemerkosaan, inses, ketika kehamilan membahayakan nyawa orang tersebut, dan ketika janin tidak dapat bertahan hidup di luar rahim. Seorang perempuan Honduras

yang dihukum karena sengaja melakukan aborsi dapat dipenjara selama tiga sampai enam tahun; seorang profesional perawatan kesehatan yang dihukum karena melakukan aborsi dapat dipenjara hingga sepuluh tahun.

Selanjutnya, pada tahun 2012, Honduras melarang kontrasepsi darurat, yang mengkriminalisasi penjualan, distribusi, dan penggunaan kontrasepsi darurat apa pun, seperti “pil pencegah kehamilan”. Honduras adalah satu-satunya negara Amerika Latin yang melarang kontrasepsi darurat. Meskipun “pil pencegah kehamilan” terkadang disebut sebagai “pil aborsi” di media, label ini lebih dari sekadar menyesatkan; obat kontrasepsi darurat hanyalah dosis yang lebih tinggi dari alat kontrasepsi biasa dan digunakan untuk mencegah pembuahan sel telur. Dengan kata lain, kontrasepsi darurat digunakan sebelum kehamilan terjadi. Akibat pelarangan kontrasepsi darurat, perempuan Honduras terpaksa membeli pil kontrasepsi darurat di pasar gelap, meskipun biayanya tinggi dan kurangnya peraturan. Wanita yang tidak dapat memperoleh akses terhadap pil kontrasepsi darurat dapat mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, yang tidak dapat mereka akhiri secara sah dan aman.

IMPLEMENTASI FEMICIDE LAW DI HONDURAS

Honduras adalah pihak yang ikut serta dalam beberapa konvensi internasional yang menjamin kesetaraan, non-diskriminasi, dan kebebasan dari kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, the “*Convention of Belem Do Para*,” the *Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others*, and the *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. Honduras meratifikasi *Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* pada tahun 1996 yang menjelaskan bahwa kekerasan domestik berada di bawah lingkup kewajiban yang ditetapkan dalam Konvensi.

Pada tahun 2013, Honduras mengamandemen *The Honduras Penal Code* dengan memasukkan tindak pidana *femicide*, serta menambahkan ketentuan yang menjadikan dilakukannya suatu tindak pidana dengan kebencian atau penghinaan atas dasar jenis kelamin atau gender sebagai suatu keadaan yang memberatkan.

Honduras telah membuat beberapa kemajuan dalam bidang legislatif dan garis depan kebijakan untuk melindungi perempuan dari kekerasan, termasuk:

1. *The National Policy on Women: Second Gender Equality Plan* untuk “memerangi kekerasan terhadap perempuan di lingkungan yang berbeda” serta untuk memajukan promosi, perlindungan, dan jaminan “hak perempuan, anak perempuan, dan remaja terhadap perdamaian dan hidup bebas dari kekerasan.” *Gender Equality Plan* ini telah menghasilkan “kerangka normatif kebijakan publik dalam mengakui dan menjamin hak-hak perempuan,” yang telah berfungsi sebagai “alat teknis dan kebijakan dalam menyuarakan kesetaraan gender.”
2. Rencana Nasional Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan 2013-2022 yang bertujuan untuk mencegah dan mengadili kejahatan berbasis gender;
3. Langkah-langkah tambahan untuk mengubah statistik kekerasan yang terjadi dan menyediakan layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan.

Meskipun demikian, terdapat ketimpangan yang signifikan antara peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik karena tidak ada hubungan yang jelas antara keduanya, termasuk perbedaan antara rencana nasional mengenai kekerasan terhadap perempuan dan undang-undang kekerasan domestik yang telah ada. Pada akhirnya, sistem hukum dan kebijakan yang ada tidak melindungi perempuan dari GBV atau menyediakan kebutuhan yang diperlukan bagi para korban seperti dukungan dan layanan. Apalagi sistem hukum dan kebijakan gagal untuk menghukum pelaku. *Special Rapporteur* mencatat tingkat kriminalitas yang makin meluas dan kejahatan sistematis, korupsi dan impunitas.

Selama bertahun-tahun, Honduras telah berupaya untuk menjadi lebih baik dalam memberikan akses terhadap keadilan dengan tindakan seperti:

- a. Mendirikan pengadilan khusus kekerasan domestik dan *Gender Unit* (2013), yang menyediakan pelatihan dan informasi tentang isu-isu yang berkaitan dengan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui desain dan implementasi melalui kampanye siklus kekerasan. Saat ini, ada tiga pengadilan nasional dengan cakupan dan staf yang terbatas;
- b. Peluncuran pengadilan keliling di Choluteca, San Pedro Sula, dan Tegucigalpa yang sudah mampu untuk memberikan layanan yang lebih terlokalisasi dan menerima pengaduan untuk dirujuk ke pengadilan khusus kekerasan domestik;

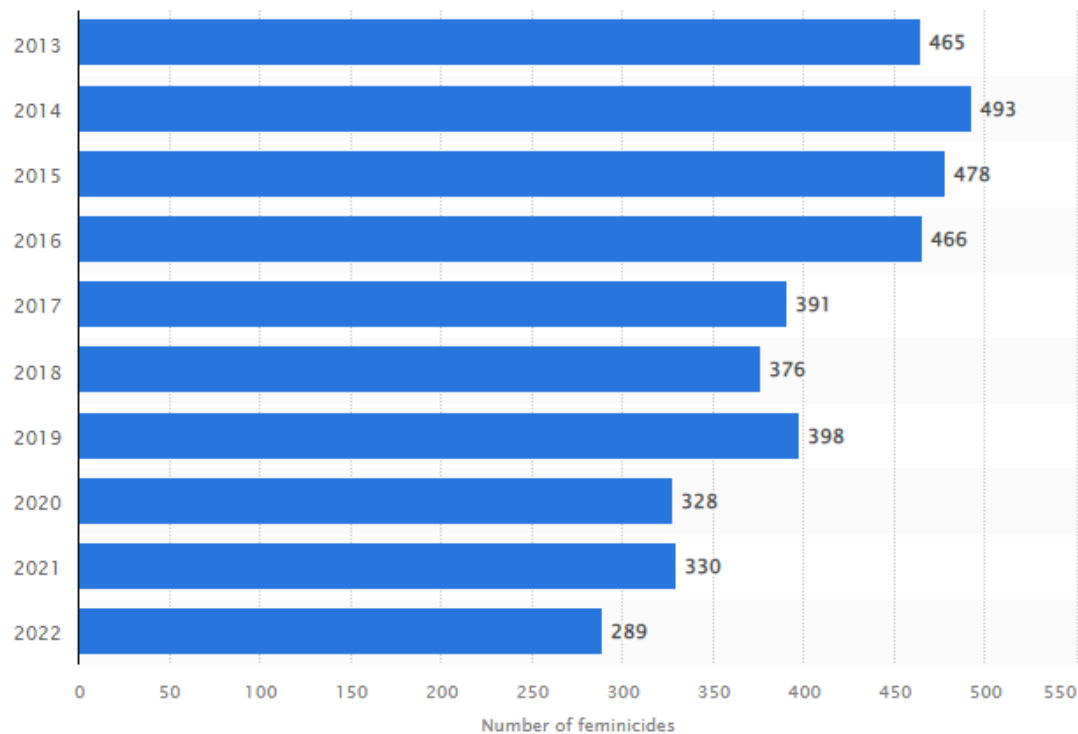
- c. Pembentukan unit *femicide* di lingkungan Direktorat Jenderal Reserse Kriminal;
- d. Mendirikan kantor kekerasan domestik (2013) di seluruh wilayah kantor pusat; dan
- e. Pembukaan pusat pelaporan (2013) di Tegucigalpa dan San Pedro Sula di mana perempuan dapat melaporkan kejahatan dan mencari pertolongan medis, selain 298 kantor perempuan yang dioperasikan oleh pemerintah (masing-masing satu kantor kotamadya) memberikan layanan kepada perempuan tentang pencegahan GBV.

Namun secara keseluruhan, respon kelembagaan diatas terhadap GBV tetap tidak memadai. Sektor-sektor utama seperti peradilan, kejaksaan, kepolisian, pelayanan kesehatan, layanan kota, dan tanggapan masyarakat. Dalam sebuah penelitian, terdapat temuan kurangnya koordinasi dan kohesi antara penyedia layanan dan operator keadilan, dan kurangnya dana juga sangat mengkhawatirkan. Selain itu, permintaan jauh melebihi batas layanan, hanya daerah perkotaan saja yang biasanya di proses, sedangkan sebagian besar penduduk tidak mendapat dukungan apa pun. Kebanyakan perempuan tidak melapor ke polisi untuk meminta bantuan karena alasan impunitas yang sudah meluas terhadap kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap perempuan dan ketakutan akan pembalasan jika pelakunya adalah pemimpin geng atau memiliki koneksi politik yang baik.

Para wanita mengungkapkan bahwa tidak ada gunanya pergi menemui polisi, karena mereka pada dasarnya tidak terlibat dalam urusan domestik. *The UN Special Rapporteur on Violence against Women* melaporkan bahwa Honduras mempunyai impunitas sebesar 95% pada kekerasan seksual dan kejahatan pembunuhan perempuan.

Karena tidak adanya badan nasional khusus yang memadai untuk mengatasi GBV, beberapa kota telah membentuk struktur mereka sendiri, terutama melalui *Municipal Offices for Women (Oficinas de la Mujer, OMM)*. OMM sering kali menjadi titik masuk pertama (setelah polisi) bagi korban GBV yang mencari dukungan.

Sejak diberlakukannya *Femicide Law* tahun 2013 telah terjadi penurunan kasus pembunuhan terhadap perempuan. Data tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 4.1 Angka *Femicide* Honduras 2013-2022

Sumber: *Statistica feminicide number honduras*

Berdasarkan gambar diatas sejak di berlakukannya *femicide law* pada tahun berikutnya yaitu 2014 sempat mengalami kenaikan kasus pembunuhan terhadap perempuan, yang kemudian kembali mengalami penurunan pada beberapa tahun berikutnya dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2019. Untuk data terakhir tahun 2022 kasus femisida mengalami penurunan menjadi sekitar 289 kasus. Jumlah tersebut kurang lebih setengah dari jumlah kasus tahun 2013 yaitu 465 kasus.

Penurunan kasus femisida yang terjadi dapat dikatakan adalah dampak dari implementasi *femicide law* tahun 2013. Walaupun demikian, tidak dapat disangkal bahwa penerapan hukum femisida ini masih jauh dari kata berhasil. Gambar 4.1 adalah angka pembunuhan wanita di Honduras yang terkonfirmasi dan masuk dalam data pengadilan dan *Centro de Derechos de Mujeres* (CDM), untuk kasus yang tidak terkonfirmasi belum diketahui jumlahnya mengingat tingkat impunitas yang tinggi di Honduras.

Dalam tulisan *Outposts of Silence (Station of Silence)* oleh Vienna Herrera seorang jurnalis yang berfokus pada kesetaraan gender, lingkungan dan struktur

kekuasaan, dikatakan bahwa hanya sekitar 15 kasus di Honduras yang di proses di pengadilan pada tahun 2013. Kurang terampilnya peradilan dalam isu gender ini kemudian mengakibatkan pelapor kekerasan domestik yang menunggu terlalu lama berakhir pada femisida (Herrera, 2020).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan femicide di Honduras terus terjadi yakni:

1. Faktor budaya

Pandangan patriarki dan seksis melegitimasi kekerasan untuk menjamin dominasi dan superioritas laki-laki. Faktor budaya lainnya mencakup stereotip dan prasangka gender, ekspektasi normatif terhadap feminitas dan maskulinitas, sosialisasi gender, pemahaman mengenai lingkungan keluarga sebagai hal yang privat dan berada di bawah otoritas laki-laki, dan penerimaan umum terhadap kekerasan sebagai bagian dari ruang publik (misalnya kekerasan seksual jalanan), pelecehan terhadap perempuan), dan/atau sebagai cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik dan menegaskan diri sendiri.

Menganalisis kekerasan secara menyeluruh memerlukan penelusuran akar permasalahannya, yang dalam kasus Honduras, seperti banyak negara lain di dunia, terletak pada kejantanan, atau chauvinisme laki-laki. Machismo adalah manifestasi dari kebanggaan maskulin yang agresif, dan sering kali berakar pada gagasan bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan dalam hampir semua aspek. Di beberapa negara, kejantanan sangat lazim seperti yang terlihat di banyak negara Amerika Latin dan Karibia, seperti Honduras.

Prevalensi kejantanan terlihat jelas di Honduras, dimana perempuan secara sistemis ditempatkan pada posisi yang sangat dirugikan jika dibandingkan dengan laki-laki dalam bidang pendidikan, perundang-undangan, politik, perburuhan, dan lain-lain. Honduras sedang menghadapi apa yang disebut sebagai “epidemi femisida” (teleSUR 2018). Seringkali, machismo dicatat sebagai “salah satu penyebab utama pembunuhan terhadap perempuan” (teleSUR 2018). Memang benar machismo sangat lazim di wilayah ini dan merupakan salah satu katalis

terjadinya pembunuhan perempuan; namun demikian, machismo harus dipahami sebagai suatu bagian tunggal, bukan sebagai gambaran keseluruhan. Oleh karena itu, kekerasan harus dikaji melalui kaca mata yang lebih luas karena untuk mengatasi kekerasan, perlu juga mengatasi faktor-faktor diskriminasi mendasar yang menimbulkan dan memperburuknya. (teleSUR 2018)

2. Faktor hukum.

Dekriminalisasi *femicide* masih terjadi baru-baru ini di banyak masyarakat. Meskipun kemajuan telah dicapai di banyak negara, hal ini terkadang menimbulkan reaksi balik, misalnya dengan memperkuat opini yang menganggap posisi perempuan tidak setara, atau negara-negara tidak mengadopsi undang-undang yang melindungi perempuan.

Di Honduras hukum masih memandang sebelah mata terkait masalah GBV yang terjadi. Hukum masih memihak pihak yang kuat. Dalam kasus Honduras, mafia dan keluarganya memiliki kekebalan hukum yang tinggi, sehingga jika mereka melakukan tindak kriminal, hukum akan menjadi sangat fleksibel terhadap mereka.

3. Faktor ekonomi.

Kurangnya sumber daya ekonomi secara umum membuat perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. Feminisasi kemiskinan merupakan sesuatu yang menjadi perhatian sebagian besar perempuan di dunia, dimana kelompok ini sangat dirugikan secara ekonomi jika dibandingkan dengan laki-laki. Fenomena ini didefinisikan sebagai “keterbatasan akses terhadap layanan dasar, sumber daya, peluang ekonomi, dan pekerjaan (mata pencaharian) yang layak” (Care dan UN Women, 2020).

Pada tahun 2019, diperkirakan 14,8 persen penduduk negara tersebut berpenghasilan kurang dari 1,90 dolar AS per hari, dan sekitar separuh penduduknya berpenghasilan kurang dari 5,50 dolar AS per hari, menjadikannya negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Latin Amerika dan Karibia setelah Haiti (Bank Dunia, 2021). Selain itu, “kesenjangan gender dalam kehilangan pekerjaan di Honduras juga termasuk yang tertinggi di LAC (Amerika Latin dan Karibia)” (Bank Dunia,

2021). Tepatnya, Honduras memiliki kesenjangan gender sebesar 27,8 persen (Care dan UN Women, 2020).

4. Faktor politik.

Kekerasan di Honduras sering dipandang sebagai tindakan tunggal antara pelaku dan korban, dan kedua belah pihak sering kali sangat terpolarisasi. Tindakan kekerasan di seluruh negeri tidak pernah dianggap saling berhubungan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman bahwa kekerasan terjadi pada tingkat yang eksklusif dan memiliki sebab yang “sudah jelas” (Jokela-Pansini, 2020). Namun, kekerasan lebih bersifat “sebagai suatu sistem yang kompleks dibandingkan sebagai suatu norma yang terjadi di tempat-tempat tertentu” (Jokela-Pansini, 2020). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kekerasan gender dicirikan dan praktik sosial apa yang terkait dengannya: sesuatu yang umum terjadi di negara-negara yang memiliki budaya militer yang signifikan, seperti Honduras.

Pada tahun 2009, negara ini menyaksikan kudeta keempat yang menggulingkan presiden PLH (Partido Liberal de Honduras atau Partai Liberal Honduras), Manuel Zelaya dari kekuasaan. Zelaya, yang pada masa jabatannya sebagai presiden, mengubah agenda politik negaranya ke arah yang lebih berhaluan kiri, secara diam-diam dibawa dari rumahnya di Tegucigalpa oleh militer Honduras dan dipaksa menjalani masa pengasingan selama hampir dua tahun. Di bawah kepemimpinan presiden *de facto*, pemerintahan kudeta Roberto Micheletti, aksi militer meningkat secara besar-besaran. Dampak dari ilegalitas kudeta yang didukung Amerika Serikat ini berupa tingginya tingkat kemiskinan dan meningkatnya kekerasan, terutama terhadap kelompok demografi yang rentan misalnya perempuan, anggota komunitas LGBTQ+, jurnalis, pengacara, BIPOC, dan lain-lain. Khususnya, pada bulan pertama setelah kudeta terjadi, tingkat pembunuhan terhadap perempuan meningkat sebesar 60 persen (Kelly, 2011).

Saat terjadi kasus femisida di Honduras, hal tersebut membuktikan kegagalan pemerintah dalam memenuhi peran dalam pencegahan. Pemerintah gagal

menyediakan kondisi yang diperlukan untuk melindungi wanita, dan banyak wanita kehilangan nyawa mereka karena ketidakefektifan dari peraturan yang mereka terapkan sendiri. Fakta dilapangan menunjukkan bagaimana laki-laki tidak takut lagi menghadapi hukuman dalam kekerasan domestik, karena hukumannya hanya sebatas pelayanan masyarakat seperti memungut sampah atau bahkan hanya membuat pinata. Bahkan *Criminal Code* di Honduras semakin melemah dan bahkan banyak yang dihilangkan. Hukuman untuk pembunuhan terhadap wanita telah dikurangi menjadi 20-30 tahun dari 30-40 tahun. Sama halnya dengan hukuman untuk pemerkosaan yang telah dikurangi menjadi 9-13 tahun dari 10-15 tahun.

4. KESIMPULAN

Hasil analisa dari penelitian ini adalah Honduras perlu meningkatkan sistem pencegahannya, meningkatkan tanggung jawab pemerintahannya, memperbaiki strategi pengawasan dan hukuman, yang diharapkan dapat menjadi langkah efektif dalam menangani femisida di Honduras. Tingkat GBV di Honduras pada tahun 2020, 278 wanita di Honduras dibunuh. Ada 318 kematian perempuan akibat kekerasan pada tahun 2021, yang berarti satu pembunuhan setiap 27 jam. Akibatnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Observatorium Kesetaraan Gender untuk Amerika Latin dan Karibia, jumlah kasus femicide per 100.000 perempuan adalah 4,6 pada tahun 2021, dengan 234 kasus yang dilaporkan. Tingkat kematian perempuan di Honduras adalah 1,0 atau setara dengan 21%. Beberapa faktor yang menyebabkan GBV terjadi antara lain faktor budaya, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor politik.

Upaya untuk lebih memerangi tingginya angka pembunuhan terhadap perempuan di Honduras terlihat pada tahun 2018 dengan dibentuknya *Interagency Commission to Monitor Investigations of Violent Deaths of Women and Femicide*, yang dibentuk setelah pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia di negara tersebut pada tahun 2017. Secara garis besar beberapa kemajuan dalam bidang legislatif Honduras dalam melindungi perempuan dari kekerasan antara lain: *The National Policy on Women: Second Gender Equality Plan* untuk “memerangi kekerasan terhadap perempuan di lingkungan yang berbeda” serta untuk memajukan promosi, perlindungan, dan jaminan hak perempuan, anak perempuan, dan remaja terhadap perdamaian dan hidup bebas dari kekerasan, lalu ada

Rencana Nasional Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan 2013-2022 yang bertujuan untuk mencegah dan mengadili kejahatan berbasis gender, dan langkah-langkah tambahan untuk mengubah statistik kekerasan yang terjadi dan menyediakan layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan.

Namun secara keseluruhan, respon kelembagaan diatas terhadap GBV tetap tidak memadai. Sektor-sektor utama seperti peradilan, kejaksaan, kepolisian, pelayanan kesehatan, layanan kota, dan tanggapan masyarakat. Dalam sebuah penelitian, terdapat temuan kurangnya koordinasi dan kohesi antara penyedia layanan dan operator keadilan, dan kurangnya dana juga sangat mengkhawatirkan. Selain itu, permintaan jauh melebihi batas layanan, hanya daerah perkotaan saja yang biasanya di proses, sedangkan sebagian besar penduduk tidak mendapat dukungan apa pun.

Walaupun demikian tetap terjadi penurunan kasus femisida di Honduras sebagai dampak implementasi *femicide law* tahun 2013. Sejak di berlakukannya *femicide law* pada tahun berikutnya yaitu 2014 sempat mengalami kenaikan kasus pembunuhan terhadap perempuan, yang kemudian kembali mengalami penurunan pada beberapa tahun berikutnya dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2019. Untuk data terakhir tahun 2022 kasus femisida mengalami penurunan menjadi sekitar 289 kasus. Jumlah tersebut kurang lebih setengah dari jumlah kasus tahun 2013 yaitu 465 kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Benjamin, M. (2009). The Honduran Coup: The Specter of Democracy, and of the Past in. NACLA Report on the Americas. Tersedia di https://nacla.org/sites/default/files/A04205006_1.pdf
- Booth, A. (2021). Honduras changes constitution to ban abortion. The Lancet. Tersedia di [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(21\)00180-X/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00180-X/fulltext)
- de Ávila, T. P. (2018). The criminalisation of *femicide*. In *Intimate Partner Violence, Risk and Security*. Routledge.
- Fregoso, R. L., & Bejarano, C. (Eds.). (2009). *Terrorizing Women*. Duke University Press Books.
- Fregoso, R. L., & Bejarano, C. (2010). Introduction: A cartography of feminicide in the Americas. In *Terrorizing Women*. Duke University Press.

- Gayathri, A. N., & Sridhar, N. (2013). *femicide: The Killing of Woman*. Tersedia di <http://dspace.stellamariscollege.edu.in:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4026/gender.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Herrera, Vienna. 2020. "*Femisida di Honduras: perempuan diberhentikan oleh pemerintah mereka sendiri*", terdapat di <https://contracorriente.red/en/2020/08/08/femicide-in-honduras-women-dismissed-by-their-own-government/>
- Howe, A., & Alaattinoğlu, D. (2019). *Contesting femicide*. Routledge.
- John P., Cunha. (2021). What Is Abortion According to WHO. Tersedia di https://www.emedicinehealth.com/what_is_abortion_according_to_who/article_em.html
- Magriasti, L. (2011). Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton. Tersedia di <https://www.academia.edu/download/31087489/48-90-1-SM.pdf>
- Menjívar, C., & Walsh, S. D. (2017). The architecture of femicide: The state, inequalities, and everyday gender violence in Honduras. *Latin American Research Review*. Tersedia di <https://www.cambridge.org/core/journals/latin-american-research-review/article/architecture-of-femicide-the-state-inequalities-and-everyday-gender-violence-in-honduras/7402F6A381FC8BA66F8BEFCA235D6FF5>
- Toledo, P. (2017). Criminalisation of *femicide*/feminicide in Latin American countries. *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*. Tersedia di <http://eprints.bice.rm.cnr.it/16492/>
- Tuesta, D., & Mujica, J. (2014). *femicide* penal response in the Americas: Indicators and the misuses of crime statistics, evidence from Peru. *International Journal of Criminology and Sociological Theory*, 7(1). Tersedia di <https://ijcst.journals.yorku.ca/index.php/ijcst/article/view/39739>
- Walsh, S. D., & Menjívar, C. (2016). "What guarantees do we have?" Legal tolls and persistent impunity for femicide in Guatemala. *Latin American Politics and Society*. Tersedia di <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/laps.12001>
- Walsh, A. (2020). Feminist networks facilitating access to misoprostol in Mesoamerica. *Feminist Review*. Tersedia di <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0141778919888070>
- Valdez, W. G. *femicide* in Latin America: An Empirical Investigation into the Causes of Variation in *femicide*. University of California San Diego. Tersedia di https://polisci.ucsd.edu/undergrad/departamental-honors-and-pi-sigma-alpha/W.-Gonzalez-Valdez_Senior-Honors-Thesis.pdf
- Varma, S.P. (1992). *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Segato, R. L. (2010). Territory, sovereignty, and crimes of the second state. In *Terrorizing Women*. Duke University Press.